

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BANDAR SAKTI (TAHUN ANGGARAN 2008)

Oleh

A G U S S E T I A N A

APBDes/APBK adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka rupiah di satu pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa/kampung.

Pemerintah Kampung Bandar Sakti menghadapi berbagai masalah dalam Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) guna meningkatkan pembangunan kampung dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya yaitu masalah pelaksanaan pembangunan kampung yang kurang maksimal. Di Kampung Bandar Sakti, pembangunan fisik yang ada sangat minim sebagai akibat keterbatasan pembiayaan. Selain itu juga fasilitas yang digunakan dalam proses implementasi tersebut kurang memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Bandar Sakti dalam meningkatkan Pembangunan Kampung beserta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasinya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Bandar Sakti dalam meningkatkan pembangunan Kampung. Jenis data yang digunakan adalah data primer, meliputi wawancara mendalam untuk berusaha mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa, proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Kampung Bandar Sakti dalam meningkatkan pembangunan Kampung belum terlaksana secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat proses implementasi. Faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan tersebut yaitu, masalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh kampung. Dana yang diberikan untuk pembangunan kampung sangat minim. Serta kurang memadainya fasilitas sarana dan prasarana. Dan faktor pendukung dalam proses implementasi tersebut adalah adanya komunikasi yang baik antara perangkat kampung dengan masyarakat setempat mengenai program-program kebijakan, adanya sumber daya manusia yang memadai, adanya wewenang dan kesadaran yang dimiliki oleh perangkat kampung untuk menjalankan tupoksinya masing-masing serta adanya koordinasi yang baik antara aparatur kampung sebagai pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, pembangunan kampung.